



Media Title	Republika		
Head Line	Tol Sumatra Genjot Ekonomi		
Date	2 Des 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	7	Article Size	
Journalist	Mursalin Yaslan	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Tol Sumatra Genjot Ekonomi

■ Mursalin Yaslan

Wisatawan bisa melanjutkan petualangannya ke Sumatra lewat jalur darat yang lebih eksotik.

LAMPUNG — Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sebagai bagian dari program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) mendesak untuk segera direalisasikan. Pemerintah pusat diminta untuk segera mengeluarkan peraturan presiden (perpres) sebagai payung hukum untuk merealisasikan pembangunan dan operasional JTTS tersebut.

Menurut Ketua Program Studi Pariwisata Universitas Indonesia Jajang Gunawijaya, wilayah Sumatra mulai dari Aceh hingga Lampung memiliki potensi wisata alam dan budaya yang luar biasa indahnya. Sayangnya, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat belum dapat mengoptimalkan potensi wisata tersebut secara maksimal yang dapat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut karena infrastruktur jalan yang ada di wilayah Sumatra belum menunjang kenyamanan wisatawan dalam dan luar negeri untuk mengunjungi objek-objek wisata yang ada di wilayah Sumatra. Karena itu, jika JTTS diwujudkan, wisatawan yang mengunjungi objek wisata yang ada di Pulau Jawa dapat melanjutkan petualangannya langsung ke Sumatra lewat jalur darat yang lebih eksotik dan menantang dibandingkan lewat udara.

"Demikian halnya wisatawan luar negeri yang singgah di Singapura lewat Batam dapat terus menikmati keberagaman hayati dan aneka budaya serta kearifan lokal yang dimiliki Sumatra," ujar Jajang, Ahad (1/12).

Jajang juga berharap, bila nanti pemerintah jadi membangun Jalan Tol Trans Sumatra, pemerintah tetap mempunyai kewajiban untuk membangun dan meningkatkan kualitas jalan nontol yang ada di Sumatra terutama yang beriringan dengan JTTS

itu sendiri. Bukan sebaliknya, justru membiarkan jalan nontol rusak.

Sependapat dengan Jajang, Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana menilai pembangunan infrastruktur jalan seperti JTTS sudah pasti memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut juga dinilainya berdampak positif bagi pengembangan pariwisata di Sumatra. "Karena itu harusnya pemerintah segera mengeluarkan payung hukum berupa perpres yang akan menjadi landasan bagi realisasi pembangunan JTTS itu sendiri," kata Sutan.

Sebelumnya, pembangunan JTTS wilayah Lampung akan dimulai pada pertengahan tahun 2014. Pihak PT Hutama Karya (HK) dan Lampung Jasa Utama (LJU) saat ini masih menggodok soal badan pengelola jalan tol tersebut di masing-masing provinsi.

"Sekarang tinggal menunggu perpres saja sebagai legalitasnya, drafnya sudah diajukan," ungkap Direktur Utama PT Hutama Karya (HK) Tri Widjadjanto Joedosastro sesuai penandatanganan nota kesepakatan pembangunan JTTS di Pemprov Lampung beberapa waktu lalu.

Meski belum ada perpres, pihaknya sudah bisa menjalankan tahapan perencanaan, survei, dan desain jalan tol, bekerja sama dengan BUMD PT Lampung Jasa Utama, pemerintah provinsi/kabupaten/kota. "Jadi tidak ada masalah sambil menunggu perpres, bukan pengerjaan fisik," ujarnya.

Tri mengatakan Jalan Tol Trans Sumatra wilayah Lampung ini akan selesai pada tahun 2018. Sedangkan pada pertengahan tahun 2016, satu ruas tol sudah bisa digunakan. Jalan Tol Trans Sumatra di wilayah Lampung memiliki panjang 128 kilometer, dengan lebar 2 x 3,6 meter, terdiri dari empat lajur dan dua jalur.

Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengatakan, usulan jalan tol wilayah Lampung sudah diajukan sejak tahun 2005. "Ini sudah sejak saya menjabat gubernur periode pertama."

Gubernur mengatakan pihaknya harus mendorong upaya pembangunan jalan tol ini dengan membuat perangkat peraturan untuk pembebasan lahan.

■ ed: muhammad hafil